

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Pemaparan serta uraian Diatas Sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan terhadap kegiatan tambang oleh DLHK Provinsi DIY didasarkan pada rencana kegiatan yang dinamakan Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, maka saran yang di ajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan ketentuan penegakan hukum secara tegas agar dapat terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup di sungai progo sebagaimana tujuan dari DLKH

Daftar Pustaka

Buku

Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika

Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta

Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta

H. Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika. Jakarta.

N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta

Muhammad Erwin, 2016, *Hukum Lingkungan*, Percetakan UNSRI

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok

Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar 1957)

Jurnal

Putra Harleando, Sapto Hermawan, 2020, "Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat di Sungai Progo", *JURNAL DISCRETIE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*.

Yuwono Prianto, Benny Djaja, 2013, *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan*

Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup, Jurnal Bina Hukum Lingkungan.

Astien Setianingrum, dkk. 2020, “Analisis Manajemen Resiko Keselamatan di Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batubara Site XYZ Berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Batubara”, *Jurnal ProHealth, Vol-II/No-01/Januari/2020, Universitas Ngudi Waluyo*

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Izin%20f>, diakses tanggal 18 April 2022,
pukul 11:56 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Versi Elektronik

<http://bantulkab.go.id/sekilas-bantulo>, diakses tanggal 16 April 2022

Kementerian ESDM RI - Media Center - Arsip Berita - Tata Cara Pemberian Izin

Usaha Pertambangan Batuan, diakese 20 April 2022

